

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN APARATUR PADA KANTOR DESA TINDOLI KABUPATEN POSO

Oleh : Herlan Lagantondo

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala desa Dalam meningkatkan kemampuan aparatur pada kantor desa tindoli serta alternatif pemecahannya. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sekretaris desa, BPD, kepala urusan, ketua Lpm dan masyarakat. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kemampuan aparatur pada Kantor Desa Tindoli belum cukup baik dengan beberapa aspek yang mempengaruhinya antara lain: Konsultatif, Partisipatif, dan Delegatif. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah Keluarga dan Pengalaman kerja.

Kata Kunci: *gaya kepemimpinan kepala desa meningkatkan kemampuan aparatur*

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan dan diselenggarakan oleh pemerintah sangatlah bergantung pada sempurnanya kinerja aparatur pemerintah dan partisipasi serta kontribusi dari masyarakat. Dengan kata lain bahwa pembangunan aparatur pemerintah merupakan bagian integral dari seluruh kegiatan pembangunan nasional. Kegiatan pembangunan nasional erat kaitannya dengan proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang dikenal pemerintah daerah dengan otonomi.

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan, dengan tujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata secara mandiri.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, yaitu daerah diberikan wewenang mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut dilaksanakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, yaitu otonomi yang dalam menyelenggarakan prinsipnya harus benar-benar sejalan dengan maksud dan tujuan otonomi, yang bertujuan untuk memberdayakan daerah termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut dilaksanakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, yaitu otonomi yang dalam

menyelenggarakan prinsipnya harus benar-benar sejalan dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai pemerintah, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan, pengembangan, perencanaan, pengawasan, serta memeberikan arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengdalian, koordinasi, pemantuan dan evaluasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera merupakan landasan yuridis formal dalam kerangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa khususnya pasal 5 tentang tugas pokok kepala desa, yang aturan pelaksanaannya sudah lebih baik dalam memberdayakan wilayah pedesaan. Dalam wilayah pedesaan seorang kepala desa selaku pemimpin yang berpengaruh adalah merupakan aparatur pemerintah yang memiliki tugas dan pelayanan yang cukup berat, apalagi dengan perannya dalam memberdayakan aparaturnya sendiri. Seorang kepala desa selaku pemimpin haruslah peka terhadap aspirasi dan kebutuhan aparatur.

Pemberdayaan aparatur yang dilakukan seorang kepala desa dalam pemerintahan pedesaan adalah faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan aparatur. Pedesaan adalah wadah organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan administrasi pedesaan, memberdayakan masyarakat yang ada didalamnya, mengatur keamanan dan ketertiban lingkungan pedesaan bahkan turut serta dalam menyelenggarakan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 26, pedesaan adalah wilayah kerja kepala desa sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pedesaan dibentuk diwilayah kecamatan. Pembentukan

pedesaan dapat berupa penggabungan beberapa wilyah seperti RT/RW.

Kantor Desa Tindoli adalah organisasi pemerintahan yang ada di lingkungan Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso yang merupakan salah satu wadah pengembangan sumber daya manusia termasuk para aparatur desa berdasarkan peran dan pengaruh pemimpin dalam ini kepala desa terhadap pemberdayaan kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknis, pengarahan, integritas seorang pemimpin, yang ada pada kantor tersebut yang mempengaruhi kemampuan kerja pegawai.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh organisasi pemerintahan desa telah menempatkan gaya kepemimpinan sebagai hal yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Gaya kepemimpinan kepala desa dapat mengantarkan pemerintah desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga tercapai tujuan yang sesuai dengan apa yang tertuang di dalam RPJMDes.. Selain itu dalam melaksanakan roda pemerintahan sangat penting untuk melakukan pendelegasian sebagian tugas agar pelaksanaan peningkatan kemampuan aparatur desa dapat terlaksana dengan baik. Seperti Kepala desa Tindoli dalam melaksanakan roda pemerintahan belum sesuai dengan yang diharapkan seperti:

1. dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan masih kurang melakukan pendelegasian sebagai tugas kepada aparatur.
2. Kepala Desa pada saat melakukan konsultasi dengan aparatur desa dalam pengambilan keputusan Kepala desa cenderung mengikuti keinginan sebagian orang yang berpengaruh dari pada keinginan orang banyak.
3. Masih kurang memberikan kesempatan kepada aparatur desa untuk berpartisipasi terhadap urusan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan hasil penelitian pada objek yang akan diteliti, jika dihubungkan dengan gaya kepemimpinan Kepala desa Tindoli terlihat kurang optimal dalam melaksanakan pekerjaan yaitu belum sesuai dengan yang diharapkan, terutama dalam hal melakukan pendelegasian.

Berdasarkan beberapa masalah tersebut, memberikan gambaran bahwa gaya kepemimpinan Kepala Tindoli belum seperti yang diharapkan dan dasar inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “Gaya Kepemimpinan Kepala desa dalam meningkatkan kemampuan aparatur pada Kantor Desa Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso”.

TEORI DAN KONSEP

Gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi mempunyai peranan yang sangat penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. Herujito (2005:7) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah (*leadership styles*) merupakan cara yang diambil seseorang dalam rangka mempraktekkan kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan bukan suatu bakat, sehingga dapat dipelajari dan dipraktekkan dan dalam penerapannya harus di sesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

Menurut (Trimo 2005:9) gaya kepemimpinan adalah merupakan perilaku pimpinan terhadap pengikutnya, atau cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Sementara itu Hersey (2002:3) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola-pola perilaku konsisten yang diterapkan dalam bekerja.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata/kalimat maupun gambar (bukan angka-angka). Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo ataupun dokumen resmi lainnya (Maleong, 1994).

Dengan tipe ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.

Dasar penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan serta mendapatkan informasi-informasi dan data-data yang ada dilokasi penelitian.

Melihat permasalahan dan tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan survey dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengacu pada data yang berhasil di kumpulkan.

a. Sumber data sekunder diperoleh melalui penelusuran pustaka dan dokumen dari berbagai sumber resmi, antara lain surat keputusan, peraturan perundangan, laporan penelitian, data statistik, data kelembagaan, dokumen berupa foto – foto, serta naskah – naskah penting sebagai bahan acuan untuk mendeskripsikan fenomena penelitian.

b. Sumber data primer diperoleh dari :

1. informan penelitian

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di lapangan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris	1 Orang
2. Kepala Seksi	1 Orang
3. Kaur	1 Orang
4. Ketua BPD	1 Orang
5. Ketua Lpm	1 Orang
6. <u>Tokoh Masyarakat</u>	5 Orang
Jumlah	10 Orang

Untuk objektifnya data, maka yang menjadi informan kunci adalah Pemerintah Desa Tindoli selaku kepala desa.

2. Gambaran realitas lapangan, yaitu melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian sehingga diperoleh gambaran realitas dari fenomena penelitian.

Milles dan Huberman (2007;16-19) prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu :

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari kegiatan pengumpulan data yang sekaligus pula merupakan bagian dari analisis.. reduksi data merupakan bentuk analisis yang bertujuan menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu.
2. Penyajian data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya pengambilan keputusan. Hal tersebut terjadi karena dengan penyajian data akandapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman tersebut.
3. Penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi, yaitu makna-makna yang muncul dalam data harus di uji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Desa Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso. Alasan peneliti memilih lokasi ini antara lain adalah peneliti berdomisili d Desa Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso.

HASIL PENELITIAN

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pada Kantor Desa Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso

Gaya kepemimpinan adalah sikap perilaku atau norma yang tercermin dari seorang pemimpin pada saat pemimpin tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan juga merupakan cerminan dari seluruh kelakuan yang diterima dan diperlakukan bersama oleh semua anggota organisasi atau masyarakat. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai aturan main yang disepakati oleh semua anggota organisasi ataupun masyarakat.

Bertolak dari pemahaman diatas, sebagai pemimpin di Desa, Kepala Desa Tindoli mutlak harus perlu siap menghadapi atau memecahkan berbagai permasalahan, baik yang bersumber dari bawahan maupun masyarakat dengan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, yang kesemuanya memiliki potensi dapat mendukung maupun menghambat dalam peningkatan kemampuan aparatur dan jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu, kepala desa Tindoli dituntut harus memiliki kemampuan atau gaya kepemimpinan yang memadai yang dapat diterima dan didukung oleh bawahan dan masyarakatnya, guna kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan kemampuan aparatur tersebut.

Peningkatan kemampuan aparatur pada dasarnya adalah merupakan masalah yang kompleks yang menuntut keterlibatan

pemerintah desa. Pemerintah desa dalam peningkatan kemampuan aparatur desa dan kemasyarakatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup besar.

Adapun hasil penelitian terhadap masing-masing indikator dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Gaya kepemimpinan konsultatif.

Gaya kepemimpinan konsultatif adalah pemimpin memberikan kesempatan yang luas kepada bawahan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Cara yang ditempuh adalah mengajikan rancangan yang bersifat sementara. Rancangan tersebut ditawarkan kepada bawahan, yang masih terbuka kemungkinan adanya perubahan. Dengan cara ini pemimpin juga berkesempatan menguji gagasannya kepada bawahan melalui proses konsultasi. Cara lain, pemimpin melemparkan masalah kepada bawahannya. Selanjutnya bawahan mengajikan saran pemecahan masalah kemudian pemimpin mengambil keputusan tertentu, yang mungkin sesuai dengan saran-saran bawahannya. Dengan cara ini terbuka peluang yang luas bagi bawahan untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dalam keikutsertaannya membuat suatu keputusan manajemen. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan peneliti dengan Kepala Urusan Perencanaan Ibu (Fini Tosadu) menyatakan sebagai berikut:

“sebagai sekdes saya melihat bapak kepala desa kurang melakukan konsultasi dan komunikasi dengan masyarakat desa yang ada sehingga kadang banyak urusan pemerintahan yang tidak terlaksana ataupun terlaksana namun hasil kurang memuaskan bahkan saya sebagai sekdes jalannya baru saya diberitahukan untuk mewakili beliau untuk urusan pemerintahan. Beliau juga melaksanakan pertemuan dengan perangkat desa yang ada apa lagi

dengan masyarakat. Nanti ada desakan dari BPD baru beliau mengadakan pertemuan atau dalam bahasa pamona ‘Mogombo’ ”. (wawancara 2018).

Selanjutnya, di perkuat dengan pernyataan oleh kepala seksi pemerintahan (Ferdinan memunta) menyatakan bahwa :

“saya menilai bahwa kepala desa tidak dapat berkonsultasi dengan baik tidak pernah mengajak kami untuk melaksanakan suatu pertemuan mungkin memang beliau merasa wibabanya akan turun atau memang beliau tidak mau untuk mengadakan sering dengan kami kasi yang ada, karena memang kami kaur desa tindoli hamper semua berijazah sarjana intinya bapak intinya kepala desa kurang berkonsultasi dengan dengan kami sehingga kami juga tidak tau harus berbuat apa karena kurangnya arahan dari bapak kepala desa. (wawancara 2018).

Selanjutnya dengan hal yang sama pula diungkapkan oleh dengan sekretaris desa (Berlita sigilipu) mengatakan bahwa :

“sebagai sekdes saya melihat bapak kepala desa kurang melakukan konsultasi dan berkonsultasi dengan masyarakat desa yang ada sehingga kadang banyak urusan kepemimpinan yang tidak terlaksana atau terlaksana namun hasil kurang memuaskan bahkan saya sebagai sekdes jalannya baru saya di beritahukan untuk mewakili beliau untuk urusan pemerintahan. Beliau juga kurang melaksanakan pertemuan dengan perangkat desa yang ada apa lagi dengan masyarakat. Nanti ada desakan dari BPD baru beliau mengadakan pertemuan atau dalam bahasa pamona ‘Mogombo’ ”. (wawancara 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa masih kurang

melakukan konsultasi dengan aparaturnya desa dalam setiap urusan pemerintahan.

2. Gaya Kepemimpinan Partisipatif

Pemimpin memberikan kesempatan dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahan untuk mengemukakan pendapat dan pengambilan keputusan. Pemimpin dan bawahan bekerja sama secara penuh dalam team. Cara lain, pemimpin dan bawahan bekerja dalam team tapi pemimpin tidak berperan langsung melainkan pendelegasian kepada staff senior. Pendelegasian pembuatan keputusan menunjukkan adanya kebebasan bertindak dalam batas tertentu. Meski kebebasan bawahan sangat dominan tapi tetap tanggung jawab berada pada pemimpin.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua BPD (R. balongka) menyatakan sebagai berikut:

“kami BPD menilai bahwa bapak kepala desa kurang berpartisipasi di dalam desa itu terbukti dengan seringnya bapak kepala desa mewakili untuk memberikan sambutan apabila ada acara suka atau duka didalam desa, seringnya juga beliau tidak menghadirkan diri jika ada kegiatan di dalam desa untuk menjadi contoh didalam desa, tidak menunjukkan dirinya untuk menjadi contoh di dalam desa, juga seringnya beliau keluar desa tanpa alasan yang jelas membuat kami bertanya-tanya kemana bapak kepala desa.

Selanjutnya, di perkuat pernyataan oleh ketua LPM (Asmara bintindjaja) yang menyatakan :

“kami menilai partisipatif bapak kepala desa yang ada kurang memuaskan karena seringnya beliau tidak hadir apabila ada kegiatan didalam desa dan juga apabila ada didalam suatu kegiatan tidak dapat tampil di depan untuk memberikan arahan atau masukan kepada masyarakat. Kurangnya berpartisipasi

dalam hal Gotong royong juga menjadi suatu hal membuat masyarakat kurang puas kepada pemimpin yang ada.

Selanjutnya, di pertegas dengan pernyataan masyarakat yang berinisial (O. dasa) yang mengatakan:

“kami sebagai tokoh masyarakat yang ada menilai bapak kepala desa kurang berperan aktif sebagaimana mestinya menjadi seorang pemimpin misalnya dalam hal Gotong royong beliau kurang mengambil kesempatan untuk menghadirkan diri. Demikian pula dalam kegiatan suka atau duka beliau malah memilih meninggalkan desa untuk urusan yang lain dari pada untuk tinggal dan hadir pada acara tersebut. Kemudian juga beliau kurang berpartisipasi dalam hal pengembangan karakter dan rasa kebersamaan dalam masyarakat, kurangnya kunjungan kerumah-rumah masyarakat itulah juga menjadi hal yang membuat masyarakat kurang simpati kepada kepala desa.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa masih kurang berpartisipasi dalam setiap kegiatan beliau memilih untuk tidak menghadirkan diri.

Dengan demikian pemerintah desa harus berpartisipasi dan harus berperan aktif sehingga setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik.

3. Gaya kepemimpinan Delekatif

Yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan delekatif yaitu atasan yang lebih banyak menyerahkan keputusan kepada bawahan biasanya atasan juga sangat jarang memberi arahan kepada bawahan tujuan gaya kepemimpinan ini adalah untuk melatih anak buah dalam menyelesaikan persoalannya sendiri dalam sebuah organisasi. mengingat gaya kepemimpinan ini, bawahan lebih banyak dituntut untuk

memiliki kemampuan lebih baik saat bekerja, mengajukan ide-ide kreatif hingga motivasi tinggi. Disiplin. Hasil observasi penulis dilapangan, ditemukan bahwa kepala desa Tindoli kurang melakukan pendelegasian sebagian tugas kepada perangkat desa. Selanjutnya tanggapan responden tentang sikap gaya kepemimpinan kepala desa dalam pendelegasian tugas kepada aparatur desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala seksi pemerintahan (Ferdinan memunta) menyatakan bahwa:

“saya menilai bahwa kepala desa kurang memberikan arahan kepada kami agar jika kami akan mewakili beliau kami dapat mempersiapkan diri kami karena memang kami kepala seksi belum memiliki pengalaman dalam urusan pemerintahan.”

Selanjutnya, di perkuat dengan pernyataan oleh sekretaris yang mengatakan:

“beliau sering melakukan kunjungan keluar desa apakah itu urusan penting atau tidak penting atau juga itu urusan mendadak atau tidak, urusan yang biasa diwakili atau tidak kami tidak pernah tau karna kami hanya sering dikabari melalui telepon atau sms sehingga dalam hal ini kami harus mengambil keputusan siapa yang harus menggantikan beliau jika ada pertemuan baik itu di desa atau di kecamatan bahkan dikabupaten”.

Selanjutnya, dengan hal sama pula diungkapkan oleh masyarakat (N.pomounda) yang mengatakan:

“kami menilai bapak kepala desa kurang memberikan kesempatan kepada aparatur desa yang ada untuk mencari atau menambah pengalaman karena setiap kali ada undangan kegiatan dari desa atau kabupaten selalu kepala desa yang menghadirinya. Jika ada kegiatan atau acara suka maupun duka beliau selalu

diwakili untuk memberikan sambutan kepada masyarakat meskipun beliau ada ditempat ini adalah gaya pendelegatif yang tidak tepat sehingga menjadi suatu pertanyaan didalam masyarakat apakah bapak kepala desa tidak mampu atau tidak tahu untuk berbicara di depan umum. Kemudian apabila ada pertemuan dibalai desa yang menguasai atau yang menjadi moto perbincangan adalah Sekdes dan ketua BPD sehingga masyarakat bertanya siapa sebenarnya kepala desa kami, yang sebenarnya yang harus berperan aktif atau yang harus menguasai pembicaraan dalam musyawarah desa adalah bapak kepala desa itu sendiri, Sehingga masyarakat itu puas menghadiri musyawarah tersebut”.

Dalam hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa masih kurang memberikan kesempatan pendelegasian sebagian tugas kepada aparatur desa untuk mencari atau menambah pengalaman karena kalau ada undangan kegiatan dari desa atau kabupaten selalu kepala desa yang menghadirinya.

2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pada Kantor Desa Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso.

a. Faktor Keluarga

Faktor keluarga salah satu faktor yang mempengaruhi jalannya pemerintahan, karena keluarga bisa menjadi salah satu penghambat jalannya roda pemerintahan dan faktor keluarga juga bisa menjadi pendukung jalannya pemerintahan yang baik. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sekretaris desa bernama Berlita sigilipu pada hari rabu Februari 2018 yang mengatakan:

“Secara umum kami menilai gaya kepemimpinan bapak kepala desa sangat di

pengaruhi oleh kepentingan keluarga, itu dapat dibuktikan pada saat pemilihan Kaur, Kadus dan juga perangkat-perangkat desa yang lain disanalah terjadi gaya kepemimpinan yang lazim di sebut kolusi dan nepotisme atau istilah yang populer ‘siapa dekat api dia panas’ menurut kami itu sudah hal yang lazim terjadi dinegari ini dan hal seperti itu sebenarnya tidak perlu dipersoalkan karena itu adalah hak kepala desa untuk memilih para pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahannya. Namun harus diingat bahwa sebelum pemilihan para calon kades telah menyampaikan visi dan misinya sudah sangat jelas disana kampanye dan tentu telah terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat seharusnya dalam pengambilan keputusan harus dilaksanakan secara musyawarah mufakat namun itu tidak terjadi didesa kami, demikian pula dalam hal yang lainnya sangat jelas bahwa kebijakan yang diambil oleh kepala desa itu sangat memihak sehingga membuat masyarakat tidak puas terhadap pemerintahan yang ada sekarang”.

Hal ini dapat diperkuat dengan jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti: wawancara dengan tokoh masyarakat yang bernama Jheskiel luminda pada hari jumat tanggal Februari 2018 yang mengatakan:

“kami menilai bahwa gaya kepemimpinan bapak kepala desa sekarang ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan keluarga itu dapat dibuktikan dengan pemilihan kaur, kadus, dan ketua RT, disanalah sangat jelas bahwa kepala desa lebih mengutamakan faktor kolusi dan nepotisme dan ini bukanlah hal yang baru di negeri ini hampir di semua tempat itu terjadi, artinya kami masyarakat tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut asal saja beliau dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan tidak berat sebelah. Namun yang terjadi

didesa kami tingkat kepuasan dari masyarakat sangat kurang karena beliau dalam kepemimpinannya sangat dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan tersebut.

Berdasarkan wawancara tersebut faktor keluarga sangat berpengaruh dalam kepemimpinan pemerindah desa karena lebih cenderung mengutamakan faktor kolusi dan nepotisme.

b. Faktor Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja merupakan yang paling utama dalam suatu organisasi, yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Demikian halnya dengan kantor desa Tindoli dimana kepala desa merupakam ujung tombak dalam pelaksanaan peningkatan kemampuan aparatur yang ada di desa.. Maju mundurnya suatu desa, berhasil tidaknya pembangunan yang ada di desa semua tergantung dari kepemimpinan kepala desa. Demikian halnya dengan .aparatur desa yang juga butuh arahan, bimbingan dan motivasi dari kepala desa agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara menyeluruh dapat terlaksana dengan baik. Faktor ini sangat mempengaruhi tugas dan fungsinya di dilingkungan Kantor desa Tindoli. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala seksi pemerintahan ferdinan memunta pada hari rabu tanggal Februari 2018 yang mengatakan:

“menjadi seorang pemimpin tidak selamanya harus di pengaruhi oleh faktor pengalaman kerja, meskipun tidak memiliki pengalaman kerja asal ada kemauan untuk belajar dan mau menerima usulan dan masukan dari orang lain tentulah seorang pemimpin dapat berhasil dalam melaksanakan tugasnya, menurut kami bapak kepala desa lebih mengutamakan hal itu kami yakin pasti pemerintahannya akan berjalan dengan baik, kemudian seorang

pemimpin juga harus menerima saran dan kritik dari masyarakat artinya faktor pengalaman kerja bukan menjadi suatu ukuran akan keberhasilan seorang kepala desa, namun sayangnya itu tidak terjadi didesa kami sehingga tingkat kepuasan masyarakat semakin lama semakin menurun, beliau tidak menjalankan seperti yang telah kami uraikan diatas, pemimpin kami melaksanakan pemerintahannya secara otoriter, kurang menerima masukan dan tidak terima apabila dikritik malahan beliau cepat tersinggung dan emosi apabila ada kritik oleh masyarakat. Itulah semua menjadi permasalahan didesa kami menurut saya ”.

Hal ini diperkuat dengan jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan peneliti: wawancara dengan kaur urusan perencanaan bernama Fini tosadu pada hari kamis tanggal Februari 2018 mengatakan:

“seorang pemimpin tidak selamanya harus dipengaruhi oleh faktor pengalaman kerja asal saja pemimpin tersebut mau untuk belajar dan mau menerima usulan dari masyarakat, kemudian juga keberhasilan seorang pemimpin juga harus mengutamakan musyawarah dan mufakat, kami menilai pemimpin yang ada sekarang mempunyai banyak pengalaman kerja baik didesa ataupun diluar desa tetapi dalam kenyataannya beliau menjadi pemimpin yang otoriter karena kurang membuat pertemuan, kurang melakukan konsultasi dengan perangkat desa yang ada, kurang menerima usulan dari masyarakat kurang untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Itulah mungkin yang menjadi permasalahan didesa kami menurut penilaian kami”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan pemerintah desa yaitu faktor

keluarga di mana faktor tersebut dapat menghambat kepemimpinan yang ada karena lebih mengutamakan faktor kolusi dan nepotisme, dan juga faktor pengalaman kerja dimana pemerintah yang ada sekarang sudah mempunyai pengalaman kerja tetapi beliau menjadi pemimpin yang otoriter karena kurang melakukan pertemuan dan kurang melakukan konsultasi dengan perangkat desa yang ada.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pada umumnya gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kemampuan aparatur pada kantor desa tindoli belum cukup baik karena adanya beberapa penghambat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya maka dapatlah penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Gaya Kepemimpinan Kepala desa dalam Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pada Kantor Desa Tindoli Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso secara umum dapat dikatakan belum cukup baik, berdasarkan analisis beberapa indikator diantaranya Konsultatif, Partisipatif dan Delegatif.
2. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan kepala desa pada kantor desa tindoli Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso adalah sebagai berikut : Faktor Keluarga dan Faktor Pengalaman Kerja

SARAN

Dalam gaya kepemimpinan Kepala desa dalam meningkatkan kemampuan aparatur pada kantor desa Tindoli beberapa hal yang penulis sarankan:

1. Perlu adanya komunikasi yang baik dan kerjasama pemimpin antara semua aparatur desa yang ada tanpa terkecuali sehingga terjalin hubungan yang baik dan

harmonis sehingga setiap kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

2. Pemimpin harus lebih tegas dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan roda pemerintahannya dan mau menerima saran/kritik dari masyarakat sehingga pemerintahannya dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R. Rustandi, (1992) , *Gaya Kepemimpinan: Pendekatan Bakat Situasional*, CV. Armico, Bandung.
- Amin Widjaja Tunggal, (1995), *activity Based Costing : Untuk Manufacturing dan Pemasaran*, Jakarta. Harvarindo
- George R. Terry (1992), *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gibson, James L., Jhon M. Ivancevich dan James H. Donnelly, Jr. (1994). *Organisasi dan Manajemen. Perilaku, Struktur, Proses*. Edisi keempat, Jakarta; Erlangga.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich dan James H. Donnelly Jr, (1996), *Organisasi; Perilaku, Struktur, Proses* (Terjemahan) Edisi Delapan, Jakarta Binarupa Aksara.
- Handayaniingrat, Soewarno (1982), *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara dan Manajent*. Jakarta: PT Inti Idayu Press
- Handayaniingrat, (1995), *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : PT. Toko Gudang Agung
- Handayaniingrat, Soewarno. (2002), *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*
- Herujito, Y.M. (2005), *Leadership*. PT Glora Aksara Pratama, Jakarta
- Ibrahim J.T, (2003), *Sosiologi Pedesaan*, Universitas Muhamadiyah, Malang
- Kartono, Kartini, (1998), *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kartono, Kartini. 2003. *Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu)*. P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kreitner, Robert; dan Kinicki, Angelo, 2005, *“Perilaku Organisasi”*. Buku 1, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2011. *Pemimpin Dan Kepemimpinan apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ndraha, Taliziduhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta
- Miles dan Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moenir,(2008), *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta; PT, Bumi Aksara.
- Pamuji S, (1993), *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rustandi Ahmad, (1992), *Gaya Kepemimpinan*, Bandung, CV. Armico
- Robert, Dale. D, (1992), *Pelayan Sebagai Pemimpin*, Malang: Gandum Mas.
- Robbin, S. P (1994), *Teori Organisasi, Struktur, desain, & aplikasi* : Jakarta: Arcan
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa